

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia semakin menyoroti pentingnya pemerintah untuk menjalankan kewajibannya kepada masyarakat. Pemerintah harus menjalankan kewajiban untuk memberikan transparansi dalam penggunaan anggarannya. Pemerintah sebagai salah satu entitas sektor publik harus menunjukkan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan pemerintah memiliki peran yang krusial. Salah satunya adalah sebagai cerminan kondisi suatu pemerintah dan sebagai alat untuk pemerintah daerah menunjukkan pertanggungjawaban atas keuangannya. (Alamsyah *et al.*, 2017).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi salah satu subjek yang perlu mendapat penelitian lebih mendalam. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 keandalan dan tepat waktu merupakan dua nilai unsur nilai informasi yang paling terkait dengan pengambilan keputusan. Sehingga fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan ada manfaatnya jika penyampaian dan penyajiannya tidak andal dan tepat waktu (Yusrawati & Cahyanti, 2016).

Skandal manipulasi laporan keuangan paling mencolok yang diingat oleh masyarakat global adalah tindakan manipulasi akuntansi oleh perusahaan energi Amerika Serikat (AS), Enron pada bulan Oktober 2001. Perusahaan ini terlibat dalam praktik-praktik tidak etis, seperti menyajikan informasi pendapatan yang tidak akurat dan mengubah laporan keuangan untuk menciptakan gambaran kinerja keuangan yang lebih baik (<https://www.cnbcindonesia.com>). Selain itu, di Indonesia pada tahun 2020 terjadi kasus suap yang diberikan kepada Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Sulawesi Tenggara, Andy Sonny. Hal ini dilakukan karena ketika dilakukan pemeriksaan LKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) terdapat penyelewengan laporan keuangan, yaitu dugaan penggelembungan anggaran dalam beberapa proyek pekerjaan. Kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini mencapai Rp 2,8 miliar (<https://nasional.kompas.com/>).

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukannya beberapa tindakan yang dapat digunakan untuk menghindari kecurangan (penyelewengan) dan kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang melekat dalam tindakan dan kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan asset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh dalam lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP ini wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi sektor publik untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisiensi. Jika SPIP dilaksanakan dengan baik dan benar, maka SPIP akan memberikan jaminan bahwa seluruh penyelenggara negara akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan sesuai peraturan. Alhasil, berbagai macam bentuk penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara tidak akan terjadi. Hal ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (Sambuaga, 2020).

Terdapat 4 jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan setahun sekali, yaitu Tidak Wajar (TW), Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan untuk mewujudkan laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Pemerintah yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan akan sangat membantu dalam mengelola keuangan yang baik dan benar. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi, laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Puteri *et al.*, 2019). Karena jika terdapat kegagalan aparatur pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan menimbulkan laporan keuangan yang keliru dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat diakibatkan kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah (Firmansyah *et al.*, 2022). Manajemen kinerja keuangan yang baik menandakan bahwa pemerintah dapat memadankan kepentingan masyarakat. Sebagai wakil masyarakat dalam menjalankan pemerintahan, sudah sepatutnya pemerintah melaksanakan tanggungjawabnya dengan jujur dalam mengelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah surah Al-Qasas ayat 26:

.....إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“.....*sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.*”

Surah tersebut didukung oleh hadist Rasulullah SAW yang dijabarkan dalam kitab Bihar al-Anwar 75:114, yang memiliki arti: “Janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya. Jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat”.

Kandungan dalam Al-Qur’an surah al-Qasas ayat 26 dan Hadits diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk memilih pekerja (pemimpin) yang memiliki kemampuan dan dapat dipercaya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawabnya. Hal tersebut dapat diimplementasikan oleh pemerintah untuk bersikap amanah dan fathanah dalam mengelola keuangan pemerintah sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar.

Teori Akuntansi yang terkait dengan kualitas laporan keuangan adalah Teori Agensi. Teori Agensi membahas tentang dimana pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah diharuskan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga tidak terjadi asimetris informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Tabel 1. 1

Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah

No	Entitas	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Gunung Kidul	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Sleman	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Bantul	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Kulon Progo	WTP	WTP	WTP

Sumber : Yogyakarta.bpk.go.id

Berdasarkan dari tabel 1.1 menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY dari tahun

anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2022 secara berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Khususnya pada Kabupaten Bantul telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun anggaran 2012-2022. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian ini mengartikan bahwa pemerintah daerah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan standar pelaporan keuangan. Namun sehubungan dengan hal ini, beberapa isu diidentifikasi oleh BPK dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ketidakpatuhan dalam pengelolaan izin dan pajak reklame serta kurang memadainya pengelolaan piutang daerah (<https://yogyakarta.bpk.go.id>). Meskipun begitu, permasalahan-permasalahan tersebut tidak mengganggu kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Selain sistem pengendalian intern (SPI) dan pemahaman akuntansi, sistem informasi keuangan daerah (SIKD) juga berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 65 Tahun 2010, sistem informasi keuangan daerah (SIKD) mempermudah pengolahan data dalam mengelola keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Bedasarkan Permendagri nomor 59 Tahun 2007, penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APBN baik menggunakan sistem atau dilakukan secara manual yang diharapkan dapat mewujudkan tercapainya transparansi dan akntabilitas. Adapun manfaat penerapan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan

pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah (Ugun, 2010).

Semakin baik sistem informasi keuangan daerah ini diterapkan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena pada hakikatnya sistem informasi keuangan daerah adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan akan sulit memenuhi karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini difokuskan pada sekelompok SKPD yang ada di Provinsi Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Yogyakarta dikarenakan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebanyak 10 kali berturut-turut meskipun ditemukannya beberapa isu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Selain itu penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah sistem pengendalian internal, sistem informasi keuangan daerah, pemahaman akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia dapat menambah kualitas laporan keuangan itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari Yenni, Irman, dan Fadrul (2020). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang berbeda, penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Pekanbaru, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebaharuan dari penelitian ini adalah peneliti menambah variabel Sistem Pengendalian Internal.

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat kesenjangan antara hasil penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Puteri, Yuliarti, dan Nastiti (2019)

menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Napisah dan Rakhmadhani (2019) menyebutkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu, secara teoritis penelitian ini mampu menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang terkait. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengambilan kebijakan dalam mengembangkan pemanfaatan sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terkait pemahaman akuntansi dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah Sistem Infomasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia memperkuat pengaruh positif Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia memperkuat pengaruh positif Sistem Infomasi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia memperkuat pengaruh positif Pemahaman Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Sistem Infomasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia memperkuat pengaruh positif Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia memperkuat pengaruh positif Sistem Infomasi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia memperkuat pengaruh positif Pemahaman Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

D. Manfaat Penelitian

Secara Umum, pada bidang auntansi sektor publik penelitian ini bermanfaat, yaitu memberikan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat secara khusus yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi penting di bidang akuntansi sektor publik. Dimana secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

literatur dan menambah referensi mengenai sistem pengendalian internal, sistem informasi keuangan daerah, pemahaman akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan khususnya di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengakomodasi, menambah, dan mengevaluasi kekurangan dan kekeliruan dari penelitian sebelumnya serta mengembangkan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kualitas laporan keuangan. Hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman kepada masyarakat terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta manfaat dari laporan keuangan itu sendiri.